

WAHABISME, TRANSNASIONALISME DAN GERAKAN-GERAKAN RADIKAL ISLAM DI INDONESIA

Zaenal Abidin

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: zabdiee@yahoo.com

Abstrak

Wahabisme diasosiasikan oleh para pengamat sebagai kelompok aliran Islam garis keras, tidak toleran dengan pemahaman Islam yang lain. Ideologi kelompok garis keras adalah totalitarian-sentralistik dan menjadikan agama sebagai referensi teologis. Pandangan ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik terhadap syari'ah termanifestasi ke dalam hukum yang totaliter dan sentralistik pula. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa terkecuali dan negara mengontrol pemahaman dan aplikasi secara menyeluruh pula. Oleh sebab itu, klaim teologis yang mereka sampaikan sebenarnya menjadi manuver politik untuk berlindung dari serangan siapa pun yang tidak mendukung atau bahkan menentang mereka, yaitu; agama menjadi alat mereka untuk meraih kekuasaan, sehingga cenderung menaruh dan memanfaatkan keyakinan bahwa manusia telah diatur oleh Allah swt, dan menjadikannya sebagai entry-point bagi para pengikut Wahabi untuk mengatur dan menguasai rakyat". Wahabi sebagai aliran garis keras percaya bahwa mereka adalah wakil Tuhan di bumi (Khalifah Allah Fil-Ardl) yang mengatur semua urusan manusia untuk menyeru manusia kepada jalan Allah. Para aliran garis keras tersebut, disamping memurnikan ajaran Islam juga ingin mempertahankan sistem khilafahan seperti: Ikhwanul Muslimin, Jamaah Muslimin (at-Takfir Wa al-Hijrah), Jamaah Syabab Muhammad, Wahabi, dan sejenisnya. Di Indonesia sendiri kemunculan gerakan fundamentalisme mulai terlihat pasca orde baru seperti cendawan di musim hujan yang tumbuh dengan subur berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, seperti FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Kata Kunci: *Politik Islam, Wahabisme, Transnasionalisme, Radikalisme.*

Abstract

Wahhabi is a group of people that professes Muhammad Bin Abdul Wahhab's doctrine. That group calls their doctrine by Wahhabi because it agrees with name of its founder. Wahhabi group is included in group of radical movement which is not tolerant to other Islamic understandings. The ideology of radical movement is totalitarian-centralistic and it makes religion as theological reference. Ideological view which is totalitarian-centralistic toward Islamic law (Syari'ah) brings manifestation into totalitarian law and also centralistic. It means that law must regulate all people's life aspect without any exception and also country controls all understandings (doctrines) and implementation comprehensively. Therefore, theological claim which they convey actually become political maneuver to protect themselves from attacks that do not support and follow them, namely: religion becomes their medium to get power, so they are inclined to put and exploit belief that people have been directed by Allah SWT and make it as an *entry-point* for Wahhabi's followers to organize and dominate populace. Wahhabi group as radical group movement believe that they are representative of God in the world (Khalifah Allah Fil-Ardl) who direct all affair of human to call human to the way of Allah. All radical movements try to purify Islamic doctrine and also want to keep Khilafah system, such as: *Ikhwanul Muslimin group, Jamaah Muslimin (at-Takfir Wa al-Hijrah) group, Jamaah Syabab Muhammad group, Wahhabi* and etc. in Indonesia itself, the attendance of fundamentalism movement started appearing after new order like mushroom in rainy season, such as Front of Islamic Defender (FPI), the Indonesian Council of Mujahidin (MMI), Hizbut Tahrir of Indonesia (HTI).

Keywords: *Islamic Politics, Wahhabism, Transnationalism, Radicalism*

A. Pendahuluan

Perkembangan Islam di dunia tidak pernah terlepas dari pengaruh sosial dan politik yang berkembang saat itu. Meskipun sejak agama Islam pertama kali diperkenalkan di wilayah Arab yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, tidak secara

langsung menampilkan profil politiknya. Ini dibuktikan ketika Nabi menguasai wilayah-wilayah Arab pada waktu itu dengan misi penyebaran Islam kesegenap penjuru dunia (*Islamic World*). Memang sebelum era imperialisme, umat

Islam sudah punya pengalaman menyelenggarakan pemerintah, bahkan semenjak Rasulullah berdomisili di Mekah. Setidaknya kita dapat mencatat era Rasulullah, era Khulafa al-Rasyidin, era Dinasti Umayyah, era Dinasti Abbasiyyah, dan era Usmani di Turki, Mughal di India dan Syafawi di Persia. Tiga pemerintahan yang terakhir ini kurun waktunya berhimpit dengan era kaum imperialis menundukkan bumi orang timur yang sebagian besar umat Islam. Rasulullah sendiri tidak menerangkan bentuk dan sistem pemerintahan tertentu untuk dijadikan sebuah model dalam pemerintahan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, apakah masih relevan sistem pemerintahan yang di gunakan oleh Rasulullah ketika sistem itu dibawa ke masyarakat Islam dibagian Timur, dan model negara yang bagaimanakah yang diinginkan Islam jika berhadapan dengan sistem dan tatanan sosial yang berbeda.

Masing-masing zaman mempunyaikaraktertersendiri karena perubahan dan tantangannya. Oleh karena itu, pada era pasca-imperialisme terdapat sederetan variabel yang membedakan dari era sebelumnya. Namun demikian, bentuk negara dan sistem pemerintahan manapun

yang dipilih oleh komunitas Muslim tertentu akan selalu membutuhkan rujukan otentik dalam setiap penyelenggaraan negara Islam, bagaimana Rasul menyelenggarakan pemerintahan. Sebagaimana yang disebutkan bahwa beliau tidak menunjukkan model pemerintahan tertentu tetapi menyediakan prinsip-prinsip serta etik dan itulah yang seharusnya dijadikan acuan.¹

Mendirikan suatu negara atau pemerintahan untuk mengelola urusan rakyat (umum) merupakan kewajiban agama yang paling agung, karena agama tidak mungkin tegak tanpa negara atau pemerintahan. Ukuran tegaknya suatu nilai-nilai agama seperti keamanan, keadilan, dan keteraturan hanya mungkin dilakukan melalui negara atau pemerintahan. Menurut Ibn Taimiyah, umat manusia tidak akan mungkin mencakupi segala kebutuhannya tanpa kerja sama dan saling membantu dalam kehidupan kelompok, dan setiap kehidupan kelompok atau bermasyarakat memerlukan seorang kepala atau pemimpin. Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu masyarakat, kelompok, bangsa dan negara merupakan suatu yang

¹M. Zuhri, *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah* (Yogyakarta: LESFI, 2004), hlm. V.

tidak terelekan sehingga mampu mengemban tugas sebagaimana yang diperintahkan agama, untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*.²

Selama ini Islam dikembangkan dengan sifat *too politically and middle east oriented*. Kedua kecendrungan tersebut membawa beberapa sisi kelemahan sejarah Islam. Orientasi politik ingin merekonstruksi kehidupan elite politik dan pola-pola perebutan kekuasaan, peperangan dan pertumpahan darah yang akhirnya menegaskan citra islam sebagai “*agama warrior*” (agama perang), bukan sebagai agama rahmat. Orientasi tersebut juga mengabaikan sejarah dan aspek-aspek kultural seperti pendidikan, perekonomian, dan keberagamaan. Sementara orientasi timur tengah mereduksi pengetahuan kita dari perkembangan sejarah dibelahan dunia muslim lainnya seolah-olah ia menjadi satu-satunya model sejarah Islam yang tunggal yang akhir menegaskan bingkai sejarah Islam yang sempit yang tidak mengenal keragaman.³

²Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 14.

³Ghufron A. Mas'adi Sebagai Pengantar Penerjemah Dalam Ira. M. Lapidus, *Sejarah*

Politik muslim melibatkan perlombaan dan persaingan penafsiran simbol dan kontrol atas lembaga, baik formal maupun informal, yang membuat dan mempertahankan simbol-simbol lembaga tersebut. Penafsiran simbol-simbol dilakukan selalu dihadapkan dengan konteksnya.⁴ Oleh karena itu, sistem politik, baik di dunia muslim atau dimanapun, tidak bisa menghindari manajemen persaingan bahkan selalu identik dengan kepentingan karena ketidakjelasan sejarah kepemimpinan dalam memimpin suatu negara yang ditinggalkan oleh para pemimpin Islam terdahulu menjerumus kepada berbagai penafsiran tentang kepemimpinan, ada yang ingin mempertahankan sistem *khilafah* atau *nation-state*. Hal tersebut dipengaruhi oleh landasan pemikiran yang berbeda-beda pula, sehingga melahirkan berbagai macam aliran dan perpecahan dalam kubu Islam seperti: Ikhwanul Muslimin, Jamaah Muslimin (*at-Takfir Wa al-Hijrah*), *Jamaah Syabab Muhammad*, Wahabi, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kemunculan fundamentalisme mulai

Sosial Umat Islam (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999).

⁴Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 6.

terlihat pasca orde baru seperti cendawan di musim hujan yang tumbuh dengan subur berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat, seperti FPI (Front Pembela Islam), Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan para kembarannya, yang diantaranya ingin mendirikan negara kehalifahan dan memurnikan ajaran agama Islam sebagaimana yang ada pada zaman Nabi, dan para sahabat.

Ideologi kelompok garis keras selalu mengusung totalitarian-sentralistik dan menjadikan agama sebagai referensi teologis. Pandangan ideologis yang bersifat totalitarian-sentralistik terhadap syari'ah tersebut berdampak pada hukum yang totaliter dan sentralistik. Artinya, hukum harus mengatur semua aspek kehidupan umat tanpa terkecuali dan negara mengontrol pemahaman secara menyeluruh. Oleh sebab itu, klaim teologis yang mereka sampaikan sebenarnya menjadi manuver politik untuk berlindung dari serangan siapa pun dan sekaligus untuk menyerang siapa pun yang tidak mendukung mereka, sehingga agama dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Mereka para garis keras "tidak sesuai menaruh dan memanfaatkan keyakinan umat manusia bahwa Allah swt, mengatur semua aspek kehidupan manusia,

menjadikannya sebagai *entry-point* bagi para pengikut garis keras untuk mengatur dan menguasai rakyat". Sedangkan agenda garis keras adalah menjadi wakil tuhan di bumi (*khalifah allah fil-ardl*). Padahal mereka yang bisa menjadi khalifah adalah mereka yang dalam beragama telah mencapai kualitas muhsinin dan mukhlisin, yakni para wali Allah.

Tahun 1924 M, adalah tahun terputusnya atau terhapusnya institusi Khalifah Islamiyah yang berdampak pada umat muslim sedunia kehilangan identitas religio-politik dan geopolitiknya. Kemudian negara-negara muslim berganti dengan model *nation-state* dalam berbangsa dan bernegara. Model ini adalah *a-histori* dalam pengalaman sejarah muslim. Kemudian dilema ini diterima secara langsung tanpa mempertimbangkan hal berikut; *Pertama*, teori politik Islam klasik dan abad pertengahan tidak memberikan konsep yang jelas dan detail tentang penyelenggaraan negara secara modern yang lebih mengedepankan pluralisme politik sehingga memberikan reinterpretasi yang varian yang bagi para pihak baik yang menerima maupun yang menolak konsep *nation-state*. Konsep *nation-state* merupakan sebuah pilihan yang tidak terhindarkan dan sebagai kenyataan yang harus

dihadapi dalam politik modern. *Kedua*, peraktek dunia Islam pasca kolonialisme yang kemudian memperoklamirkan diri sebagai negara yang berdaulat dengan mengakui pluralisme politik dalam wilayah teritorial tertentu, menjadi sebuah konsensus dan kesadaran bersama dalam penerimaannya terhadap konsep *nation-state*. *Ketiga*, banyaknya para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang mendukung penerapan *nation-state* secara menyeluruh atau sebagian sebagai sesuatu yang alami dalam institusi politik yang bersifat keduniawian.⁵

Di Indonesia, umat Islam telah bekerja untuk membangun negara yang dapat menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak setiap individu dalam kehidupan sosial, politik, dan negara. Ajaran agama terutama Islam, menentang keras praktik bernegara yang sewenang-wenang, peraktek yang menyimpang dan perilaku aktor negara yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa, karena Indonesia adalah masyarakat yang sifatnya *plural societies* (masyarakat majemuk) sebagai *ideal type* masyarakat Indonesia yang berbeda

dengan negara Islam yang ada berada dibelahan bumi yang lain.

B. Wahabisme di Indonesia

Berawal dari abad 18 di Arab Saudi di bawah penguasa lokal *Dir'iyah*, Muhammad As-Saud (1745-1965) dan Muhammad Ibn Abdul Wahab (1703-87), seorang pembaharu puritan yang bersemangat mendirikan negara Islam, tetapi tidak berhasil sehingga kedua tokoh tersebut membentuk aliansi yang menguntungkan kedua belah pihak, aliansi ini mendorong Ibn Saud untuk menguasai semenanjung Arab dan menggalang "wahabisme" sebagai gerakan reformasi besar dalam sejarah muslim modern. Kedua tokoh ini berhasil merebut kota Makkah dan Madinah pada tahun 1925 tidak lepas dari dukungan Inggris dengan perjanjian pertemanan dan kerjasama.⁶ Gerakan ini menyapu bersih Arabia tengah merebut mekkah dan madinah serta mempersatukan kabilah-kabilah kedalam apa yang diyakini oleh para pengikutnya sebagai pembentukan kembali masa-masa Islam pada abad ke-7 dibawah pimpinan Nabi Muhammad saw.

⁵Ahmad Yani Asrori, Menuju Khilafah Islamiyyah; Perjuangan Ikhwanul Muslimin, Yogyakarta: Syasat Press, 2008, hlm. 2.

⁶Dale F. Eickelman dan James Piscatori, *Op, Cit*, hlm. 73.: John L. Esposito, *Unholy War; Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003), hlm. 5.

Ibn Sa'ud memandang gerakan wahabi adalah senjata politik potensial yang ampuh dan strategis. Karena bagi siapapun yang tidak terbiasa memperlakukan teks-teks ajaran agama secara rasional, dewasa dan penuh perasaan, klaim dan tuduhan teologis akan sulit ditolak. Ketidak berdayaan dihadapan klaim dan tuduhan teologis inilah yang menjajikan kekuasaan politik. Hal ini terlihat dari perjanjian kedua tokoh tersebut. Bahwa Abdul Wahab dan keturunan laki-lakinya akan mengendalikan otoritas keagamaan, sedangkan Ibn Sa'ud dan keturunan laki-lakinya akan memegang kekuasaan politik, dan masing-masing akan menikahi keturunan wanita yang lain agar aliansi ini bisa terus dilestarikan.

Dalam perkembangannya, Abdul Wahab mengatakan "untuk membuat suatu perubahan tidak hanya dengan perkataan saja, akan tetapi harus dibarengi dengan perbuatan". Maka dilakukanlah jihad dengan perbuatan bertujuan untuk merealisasikan ajarannya. Aksi kekerasan pertama wahabi ketika itu menghancurkan makam Zaid Ibn al-Khaththab, sahabat Nabi dan saudara Umar Ibn Khaththab. Didukung oleh Utsman Ibn Mu'ammara dan menyiapkan 600 orang pasukan serta pengikut wahabi pada waktu

itu demi melancarkan rencana tersebut. Aksi kekerasan wahabi ini tidak lepas dari ideologi yang ingin menciptakan negara Islam yang bebas dari TBC. Dalam penaklukan Jazirah Arab 1920 lebih dari 400 ribu umat Islam dibunuh dieksekusi secara publik atau di amputasi, perlakuan ini tidak lepas dari tindak kekerasan baik dari doktrinal, kultural, maupun sosial. Dengan tindakan kekerasan tersebut sultan Utsmani merasa wajib menghentikan gerakan wahabi dan berusaha menguburnya walaupun didasari dengan kepentingan politik, juga pertimbangan agama. Ketika Muhammad Ali Pasya berhasil menangkap para tokoh wahabi mereka diajak berdialog untuk mencari kebenaran tetapi ajakan ini ditolak dan menganggap pahamnya yang paling benar.

Kemudian pada tahun 1979 Ayatullah Khomeini melakukan kritik dan penolakan terhadap kerajaan Saudi karena kebiasaan buruk keluarga istana Sa'ud yang tidak sesuai dengan norma ajaran Islam. Ketika itu Ayatullah melontarkan gagasan penting yakni pembebasan Mekah dan Madinah dari cengkraman wahabi dan menetapkannya dibawah pengelolaan dan pengawasan internasional. Sebagai pemimpin Iran, Khomeini mungkin punya agenda politik tersendiri, tetapi

gagasannya sangat penting dan berharga. Pendudukan bersenjata atas masjid al-Haram oleh Juhayman al-Utaybi dan para pengikutnya pada 1 Muharram 1400/20 november 1979 serta kritik keras dan gagasan Ayatullah Khomeini telah membuat penguasa wahabi-saudi sadar bahwa borok-borok mereka terungkap secara telanjang ke dunia internasional mengakibatkan menurunkan citra mereka sebagai *Khadim al-Haramain*. Maka sejak 30 tahun yang lalu penguasa wahabi-Saudi telah membelanjakan uang yang mungkin lebih dari USD 90 milyar yang disalurkan melalui *Rabithat al-Alam al-Islami, International Islamic Relief Organization (IIRO)* dan yayasan lain seluruh dunia untuk membela diri dan memperbaiki citra melalui wahabisasi global. Di Indonesia IIRO menyalurkan dananya diantaranya melalui DDII, LIPIA, MMI, Kompak, dan lain-lain.⁷

Sebelum serangan ke *World Trade Center (WTC)* pemerintah Saudi memang membiayai al-Qaeda. Namun setelah serangan 11 september 2001, terutama setelah al-Qaeda menyerang kerajaan

Saudi, pemerintah Saudi berhenti membiayai gerakan teror tersebut tetapi menggantinya dengan pembiayaan penyebaran ideologi keseluruh dunia (*wahabisasi global*).⁸ Pergerakan kaum wahabi yang dimulai oleh Ibn Taimiyah dan di sokong oleh Ibn Qayyim al-Djauziah (1292-1350), kemudian disebarluaskan oleh Muhammad ibn Abdul Wahab (1703-1787) diintensipkan oleh Djamaludin al Afgani (1838-1897) dan muridnya Rasyid Ridha (1856-1935), yang menitik beratkan pada reform ajaran agama murni serta mengharmoniskan dalam kehidupan kemasyarakatan dan politik. Di India dipopulerkan oleh Sayyid Ahmad Khan, sedangkan di Indonesia dikenal dengan Kaum Padri walaupun akhirnya gerakan ini kandas dan ditumpaskan oleh penjajah meski sudah di hanguskan oleh penjajah namun ide besarnya terus berkembang, mendaging, menjalar ke darah rakyat, menjelma dalam kancah pendidikan dan dakwah Thawalib di Sumatra Barat, al-Irsyad di Suamatra dan Jawa.

Gerakan ini masuk di Indonesia sekitar tahun 1802 bersamaan dengan pulangnya Haji Miskin dan para koleganya dari menunaikan

⁷KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2009, hlm. 69.

⁸Baca, John L. Esposito, *Unholy War; Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003).

ibadah haji dan sementara bermukim, pulang ke Minangkabau orang-orang inilah yang dikenal dengan julukan "harimau nan salapan". Haji Miskin dengan mazhab wahabinya telah memberikan tekanan dan gerakan reform umat Islam di Indonesia dan pada akhirnya mendirikan perguruan di Bonjol dan yang ditunjuk sebagai ketuanya Malim Basa dan kemudian dikenal dengan julukan Tuanku Imam Bonjol.⁹

Disamping itu pemerintah kolonial Belanda membantu pergerakan kaum adat untuk melawan gerakan Paderi yang di pimpin oleh Gubernur Jendral Indenburg dengan tujuan mengkristenkan terhadap seluruh penduduk nusantara. Tetapi masyarakat pada waktu itu sudah tidak mau diperalat lagi karena politik pengkristenan itu yang dianggap paling busuk karena memeralat agama untuk kepentingan politiknya dengan harapan bumi nusantara menjadi milik Nederland. Dan pada tahun 1905 terbentuklah perkumpulan *Jami'at Kahair* di Jawa, dari perkumpulan inilah K.H.A. Dahlan (Muhammad Darwis) pemimpin pertama Muhammadiyah dan orang-orang terpelajar lainnya mengenal bacaan-bacaan kaum reformis yang didatangkan dari

⁹L. Stoddard. *Arah Baru Islam di Indonesia*, Djakarta, 1966, hlm. 306.

luar. Dan pada tahun 1912 K.H.A. Dahlan mendirikan Muhammadiyah, kemudian diusul pergerakan *al Islam Wal Irsyad* di Jakarta 1914, tahun 1923 berdiri prsatuan Islam PERSIS di Bandung dan tidak lama berdirilah Persatuan Umat Islam di Madjalengka yang semua perkumpulan itu berideologikan ajaran-ajaran Wahabi atau gerakan reform.

Seorang penulis dari Belanda, C.A.O. Van Nieuwenhuize dalam bukunya yang berjudul "*Aspects of Islam In Post Colonial Indonesia*" mengatakan: sesuai dengan teladan yang telah dilakukan oleh Muhammad 'Abduh Mesir, maka di Jogjakarta, Jawa, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, menyalurkan penapsiran yang sesuai dengan akal atas ajaran Islam yang murni; maka gerakan ini mulai melaksanakan ajaran-ajaran Islam secara modern dengan mendirikan lembaga-lembaga perguruan yang sesuai dengan pelajaran sekolah-sekolah pemerintah dan pada pokoknya ditunjukkan kepada pngajaran yang langsung mengenai soal-soal keislaman, serta mendirikan rumah sakit, organisasi kepanduan dan wanita. Dalam berbuat demikian itu Muhammadiyah mendapat

sambutan luas menurut kadarnya dari masyarakat Islam".¹⁰

Pendirian Muhammadiyah yang berideologikan pemurnian ajaran tauhid sudah jelas, seperti apa yang diajarkan salaf dengan jalur keemasannya, seperti halnya kaum wahabi dan hambali pada umumnya, maka ditolaknya pengantara dalam do'a yang lazim dikerjakan masyarakat Islam pada waktu itu, sebagai salah satu intervensi kebudayaan asing kedalam Islam, segala bentuk "tawassul" ditolak sekalipun dengan para Nabi atau wali-wali besar dan sahabat, sebab yang demikian itu dianggapnya syirik, dan manjatuhkan Tuhan karena yang berhak memiliki dan meberikan syafaat adalah Allah sendiri, sedangkan manusia yang sempurnasepertiNabidanparaWali-wali besarpun tidak akan memberi syafaat. Perbuatan-perbuatan yang di buat-buat oleh umat Islam yang menyimpang dari garis agama yang benar ditolak mentah-mentah oleh Muhammadiyah.

Muhammadiyah berdiri, tidak hanya didorong oleh sangat reaksionernya pemerinntahan kolonial Belanda terhadap agama Islam dan perkembangannya, akan tetapi karena tuntutan sejarah umat

Islam yang memerlukan sinar baru dalam menghadapi dunia modern. Kemajuan zaman yang sangat pesat dan hebat tidak bisa dihadapi oleh khurafat dan bid'ah, tetapi juga harus kembali kepada ajaran-ajaran Rasulullah sendiri, yang telah teruji kebenarannya sepanjang masa; kemunduran dan pendesakan dunia barat terhadap Islam tidak lain hanyalah disebabkan oleh kesalahan umat Islam itu sendiri, yang menyelewengkan ajaran agamanya sendiri karena sebab itulah Muhammadiyah suatu gerakan Islam yang bukan sekedar organisasi sosial, amal dan bukan juga partai politik yang hanya berkecimpung dalam kancah perjuangan politik, ia juga sebagai gerakan Islam yang menjiwai segala gerak-gerik dan tingkah laku seseorang, yang kemudian menjelma dalam perbuatan konkrit, baik dalam sosial, ekonomi, kultural maupun dalam bidang politik sekalipun.

Ajaran Muhammadiyah tidak mencampuri urusan Islam dengan politik. Namun sebagai pribadi, banyak anggota Muhammadiyah yang tidak ketinggalan ikut serta duduk dalam badan-badan perwakilan baik yang bersifat daerah maupun pusat, anggota-anggota itu aktif pula dalam gerakan nasional yang berkecimpung dalam bidang

¹⁰L. Stoddard. *Op, Cit.*,. 309.

politik negara seperti PSII¹¹ yang dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto, PNI pimpinan Ir. Soekarno dan pada tahun 1926 tokoh Muhammadiyah K.M. Mas Mansur bersama tjokroaminoto memimpin perutusan untuk menghadiri kongres Islam sedunia di Makkah yang kemudian melahirkan cabangnya di Indonesia 'MAIHIS' (*Mukhtamar Alam Islami Hindi As Syarqiyah* di Indonesia).

Relasi antara wahabi dan kelompok-kelompok garis keras lokal memang tidak bisa sepenuhnya ditunjukkan secara organisatoris struktural, karena lazimnya mereka malu disebut kaki tangan wahabi. Di samping ada kontak-kontak dengan tokoh-tokohgariskerastransnasional, relasi mereka juga berdasarkan kesamaan orientasi, ideologi dan tujuan gerakan. Kelompok-

¹¹Nama sebelumnya adalah SDI (Serikat Dagang Islam) yang di dirikan oleh H. Samanhudi pada 11 november 1911 di Surakarta. Kemudian pada 10 september 1912 SDI diubah menjadi SI (Serikat Islam) di bawah pimpinan Tjokroaminoto dengan tujuan untuk menentang dominasi Cina dan menentang segala bentuk penghinaan yang dialami oleh penduduk peribumi, untuk merespons kristenisasi oleh para missionaris, dan berdiri melawan eksploitasi yang dilakukan oleh kolonial Belanda. baca, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Masyikuri Abdullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

kelompok ini memiliki relasi dengan organisasi transnasional yang diyakini berbahaya dan mengancam pancasila, nkri, dan UUD 1945, disamping ancaman bagi islam indonesia yang santun dan toleran.

C. Transnasionalisme dan Gerakan Radikal Islam di Indonesia

Masa transisi, yang mendahului munculnya radikalisme Islam, pada dasarnya merupakan sebuah perjuangan untuk melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Dipelopori dan dimotori oleh para tokoh yang terdidik secara Barat, perjuangan ini berbelok kearah aspirasi-aspirasi patriotik, penerapan demokrasi palementer serta pengadopsian hukum-hukum Eropa. Setelah tahun 1920 dan runtuhnya kerajaan otonom, reformisme Islam kehilangan asosiasinya dengan struktur-struktur tertentu dari negara dan institusi-institusi politik. Patriotisme menegaskan dirinya sebagai sebuah gerakan utama dan demokrasi parlemen menjadi solusi yang menakjubkan bagi seluruh persoalan-persoalan yang dihadapi setelah terpinggir dari negara dan ekonomi modern, reformasi islam

berubah bentuk ke dalam bentuk gerakan salafisme.¹²

Para aktivis garis keras sebenarnya sadar akan keterlibatannya dalam “perang ide-ide” untuk meyakinkan umat Islam di seluruh dunia, bahwa ideologinya adalah satu-satunya interpretasi yang benar tentang Islam. Mereka memahami Islam secara monolitik dan menolak varian-varian Islam lokal dan spiritual seperti yang diamalkan umat Islam pada umumnya, padahal sudah jelas diseluruh dunia ini Islam tidak akan pernah sama dalam penerapan-pengamalan-keagamaan, sebagaimana yang dijelaskan Mark R. Woodward “Islam yang ada di Arab dan di Indonesia tidak ada yang salah melainkan itu adalah varian Islam”, akan tetapi mereka para garis keras menyebutnya sbagai bentuk pengalaman Islam yang salah dan sesat karena sudah tercemar dan tidak murni lagi.

Berdasarkan kriteria harfiah (literalis) dan radikal (garis keras), organisasi ini adalah organisasi fundamentalis yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Dilihat dari sisi HAM seperti hak hidup selain anggota

¹²Youssef M. Choueiri, *Islam Garis Keras; Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, Terj, Humaidi Syuhud, (Yogyakarta: Qonun, 2003), hlm. 81.

dari kubunya, kecuali sesama fundamentalis. Hak-hak kebebasan dalam berpendapat dan dalam hal mengkritik seperti bagi az-Dzahabi tentu saja akan lebih tidak diakui lagi. Bagi para pengikut garis keras jika diluar pemikiran Islam yang dianut dirinya adalah keliru dan kafir, yang pengusungnya halal dibunuh.¹³

Mejelang dan setelah orde baru tumbang Indonesia menyaksikan begitu banyak kelompok-kelompok garis keras (radikal) yang tumbuh seperti cendawan garis di musim hujan, beberapa di antaranya adalah; Fron Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Laskar Jihad, Jamaah Islamiyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), PKS, komite persiapan penerapan syari’ah Islam (KPPSI), dan lain-lain, disini sudah jelas Wahabi bukan hanya membiayai terorisme tetapi juga penyebaran ideologi.

Strategi utama gerakan Islam transnasionalisme dalam usaha membuat umat Islam menjadi radikal dan keras adalah dengan membentuk dan mendukung kelompok-kelompok lokal sebagai kaki tangan “penyebar’ serta berusaha meminggirkan dan

¹³Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari’ah dan Ham, Fundamentalisme dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2013), hlm. 261.

memusnahkan bentuk-bentuk pengamalan Islam yang lebih toleran yang telah lebih lama dan dominan di berbagai belahan dunia muslim. Oleh karena itu, pada garis keras berusaha melakukan infiltrasi keberbagai bidang kehidupan umat Islam baik dengan cara halus hingga yang kasar dan keras.¹⁴

Adapun gerakan transnasional di Indonesia: Ikhwan muslimin yang didirikan Hasan al-Banna¹⁵ di Mesir hadir di Indonesia pada awalnya melalui lembaga-lembaga dakwah kampus yang kemudian menjadi gerakan tarbiyah. Kelompok ini kemudian melahirkan PKS yang sebelumnya bernama PK¹⁶ dua unsur terkait telah mendominasi pemikiran tarbiyah PKS sejak 1980 "determinasi

¹⁴KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Op, Cit.*, hlm. 44.

¹⁵Didirikan pada tahun 1928, lahir di Ismailiyah, mesir, meninggal pada 12 february 1949, asumsi teoritisnya tidak membedakan dari asumsi teoritik milik Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan Ibnu Badis. Ikhwanul muslim memiliki simbol dua pedang melintang menyangga al-Qur'an yang berarti siap mengangkat senjata dan melakukan peperangan demi tegaknya bendera Islam dan ajaran al-Qur'an di muka bumi. Motto Ikhwanul Muslimin "rubban fi al-lail wa fursan fi al-nahar", pendeta di malam hari dan kesatria di siang hari.

¹⁶PK adalah perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi mengisaratkan hubungan yang subordinat.

mengislamkan secara utuh bukan hanya kehidupan individual muslim namun juga masyarakat dan politik, pemahaman bahwa perubahan membutuhkan pendekatan bertahap dan jangka yang panjang. Secara formal PK dan PKS telah menjaga dualisme silang sengkabut dalam hal ideologi. Secara formal PKS menyatakan dukungan terhadap format negara Islam yang ada yaitu republik kesatuan berdasarkan ideologi yang netral secara agama. Namun dokumen doktrinal partai sangat jelas memandang Islamisasi negara secara komprehensif dan penerapan syari'ah sebagai tujuan jangka panjang. Misalnya, buku PKS yang sudah lama diterbitkan dengan judul *platform dan falasafah perjuangan* menyatakan:

"Bagi muslim, mempunyai negara yang bebas menerapkan nilai-nilai Tuhan dan syari'at-Nya merupakan kewajiban dalam Islam tidak dikenal pemisahan agama dan politik. Kesatuan agama dan negara adalah prinsip utama dalam Islam serta dalam sejarah yang panjang dalam Islam, negara bisa disebut Islami ketika syari'ah, sebagai ketetapan langsung Tuhan, menduduki posisi tertinggi dalam mengatur semua urusan."¹⁷

¹⁷Antoni Bubalo, *Dkk, PKS dan Kembarannya; Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, Terj, Syamsul

Pada dekade 60-an terjadi perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi sehingga melahirkan keturunan garis keras di seluruh dunia hingga dewasa ini. Keduanya berbagi fanatisisme ideologi, ambisi kekuasaan sentralistik, orientasi internasional dan formalisasi agama. Wahabi sendiri memiliki dana besar terutama setelah harga minyak menjulang kelangit pada tahun 1973 akan tetapi ini tidak memadai hanya berorientasi kepada materi mengakibatkan kurang terdidik, sedangkan Ikhwanul Muslimin cukup terdidik namun tidak mempunyai dana. Kelak terlihat, dari hasil perkawinan gerakan tersebut sangat strategis dan darinya lahir gerakan internasional dengan ideologi, sistem, dan dana yang kuat serta terus berkembang dan memperluas sayap-sayapnya ke seluruh dunia hingga dewasa sekarang ini.¹⁸

Akhir 1970-an dan awal 1980-an merupakan suasana menegangkan bagi penguasa Saudi. Keberhasilan revolusi Islam Iran pada tahun 1979, ditambah pemberontakan Juhayman al-Uteybi dan anak buahnya yang mendukung masjidil haram pada tahun yang sama. Pada dekade ini

Rizal, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 63.

¹⁸KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Op, Cit.*, hlm. 83.

presiden Mesir Anwar Sadat terbunuh dan Unisoviet menguasai Afganistan. Pada dekade 1980-an proyek wahabisasi global dengan dukungan dana dari Saudi dan sistem Ikhwanul Muslimin bergerak jauh lebih cepat. Hal ini dilaksanakan melalui yayasan wahabi seperti *Rabithath al-'Alam al-Islami*, *al-Haramain*, *International Islamic Relief (IIRQ)* dan banyak yang lainnya. Kemudian yayasan ini menjadi terkenal saat PBB menyebut sebagai "*terrorist-funding entry*" yang membiayai aksi-aksi teror di berbagai belahan duni termasuk di Indonesia.

Perang Afganistan melawan Unisoviet memikat banyak anggota garis keras dari seluruh dunia termasuk pendiri laskar jihad *Ja'far Umar Thalib* dan beberapa pelaku kampanye *Jamaah Islamiyah*, termasuk Hambali, Imam Samudra, dan Ali Gufran bahkan *Jamaah Islamiyah* yang didirikan oleh mantan anggota Darul Islam, Abdullah Sangkar dan Abu Bakar Baasyir yang punya kaitan erat dengan al-Qaeda melalui hambali yang sebelum di tangkap termasuk pengurus inti al-Qaeda. Secara struktural pengurus inti al-Qaeda berteknik Arab dan berasal dari timur tengah kecuali hambali. Hambali adalah komandan militer jamaah islamiyah yang berjuang untuk menenyapkan

NKRI dan menggantinya dengan khalifah internasional. Jamaah Islamiyah bertanggung jawab banyak atas peledakan bom di Indonesia seperti pengeboman hotel marriot, Bursa Efek Jakarta (BEJ), bandara Soekarno Hatta, bom Bali, pengeboman diberbagai greja, usaha pembunuhan duta besar Filipina bahkan bom di masjid Istiqlal yang bersekala kecil termasuk aksi Ji sebagai usaha penumbuhan sentimen keagamaan bahwa ada serangan terhadap Islam Indonesia.

Sejak dekade 1970-an, ketika umat Islam Indonesia kesulitan keuangan untuk membiayai studi para mahasiswa belajar keluar negeri, Wahabi menyediakan dana yang lumayan besar melalui DDII, terutama beberapa negara di timur tengah, terutama Arab Saudi, belakangan kebanyakan alumni dari perogram ini menjadi penyebar paham transnasional dari timur tengah ke Indonesia, tidak berhenti disitudengandukungandanawahabi, DDII juga memainkan peran penting dalam penerjemahan buku-buku dan penyebaran gagasan tokoh-tokoh transnasional seperti Hasan Al Banna, Sayyid Qutub¹⁹, Abdul A'ala Maududi, Yusuf Qhardawi.

¹⁹Ideologi kedua bagi Ikhwan setelah Banna, sedangkan Maududi, pemimpin Jamaat-i Islami di Pakistan pada tahun

Kedua Hizbut Thahir²⁰ Indonesia (HTI), dengan gagasan pan-Islamismenyayanginginmenegakkan Khalifah Islamiyah di seluruh dunia, dan menetapkan nusantara sebagai salah satu bagian salah satu bagian didalamnya. *Ketiga*, Wahabi yang berusaha melakukan wahabisasi global. Dari ketiga gerakan transnasional tersebut Wahabi yang paling kuat, terutama dalam hal pendanaan karena memiliki sumur minyak yang melimpah. Namun ketiga gerakan transnasional ini bahu-membahu dalam mencapai tujuan mereka yakni formalisasi Islam dalam bentuk negara dan aflikasi syari'ah sebagai hukum positif dan Khalifah Islamiyah.

Kehadiran Wahabi di Indonesia tidak lepas dari peran dewan

1941. Sebutan bagi para pengidola Qutb adalah Qutbisme yang secara militan dan ekstrim mewarnai gejolak konstalasi politik Mesir pasca 70-an yang di eksekusi mati pada tahun 1966, sebagai penyebab terbunuhnya adalah pemikirannya yang ditulis dalam buku *Maalim fi at-thariq* (rambu-rambu "petunjuk" menuju jalan yang lurus) gagasan utama buku ini adalah penancangan kekuasaan mutlaq Allah, lewat doktrin tiada hukum kecuali hukum Allah. Baca, Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah dan Ham, Fundamentalisme dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2013), hlm. 258.

²⁰Cabang dari Ikhwan yang dibentuk dan berpusat di Yordania.

dakwah Islamiyah Indonesia dengan dukungan besar dari Jama'ah Salafi (wahabi), DDII²¹ mengirimkan mahasiswa untuk belajar ke timur tengah, sebagian dari mereka inilah yang kemudian menjadi penyebar ideologi wahabi-Ikhwanul Muslimin Indonesia. Dengan dukungan dana penuh wahabi-Saudi DDII mendirikan LIPIA dan kemudian kebanyakan alumninya kemudian menjadi agen

²¹Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang pendirinya adalah Muhammad Natsir mantan perdana menteri partai Islam terbesar era 1940-an dan 1950-an adalah seorang pemimpin Islam yang terkenal di dunia muslim, sering berkunjung ke Timur Tengah dan Asia Selatan (khususnya Pakistan) dan sempat menjadi ketua Liga Dunia Islam. Masyumi dilarang pada tahun 1960 dan setelah itu Natsir dijebloskan kepenjara kemudian dibebaskan pada tahun 1966 dan dilarang kembali memasuki ranah politik oleh rezim Soeharto, karena larangan tersebut Natsir mengalihkan perhatian ke aktivitas dakwa dan pendidikan dan akhirnya mendirikan DDII pada tahun 1967. Dua inisiatif natsir, secara khusus menanamkan menanamkan pemikiran ikhwan di Indonesia. *Pertama*, membangun kontak dengan dunia Arab demi memperoleh bantuan beasiswa buat warga Indonesia demi melanjutkan belajar ketimur tengah. *Kedua*, Natsir mengarahkan DDII untuk berfokus ke kegiatan dakwah kampus sebagai wahana mencetak pemimpin muslim masa depan dengan pendekatan Islam dalam kehidupan politik. Antoni Bubalo, Dkk, *PKS dan Kembarannya; Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, Terj, Syamsul Rizal, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 48.

gerakan Tarbiyah dan jama'ah salafi di Indonesia.²² Jika dibandingkan dengan HTI, wahabi memang jauh lebih dekat dengan Ikhwanul Muslimin kedekatan ini berawal dari dekade 1950 dan 1960 ketika Gamal Abdel Nasser membubarkan Ikhwanul Muslimin dan melarang semua kegiatannya di mesir mengakibatkan banyak dari tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin melarikan diri dan meninggalkan negaranya. Secara ringkas bisa dikemukakan bahwa agenda utama kelompok radikal adalah untuk meraih kekuasaan politik melalui pormalisasi agama. Mereka mengklaim, jika Islam menjadi dasar negara, jika syari'ah ditetapkan sebagai hukum positif, jika khalifah Islamiyah ditegaskan, maka semua masalah akan selesai.

Para pemilik aliran garis keras memperjuangkan perda-perda syari'ah dengan pernyataan bahwa Islam merupakan agama yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Atas dasar itu, Islam harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, bukan hanya ibadah tetapi juga dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum dan sebagainya. Akan tetapi pandangan ini memang dianut oleh semua umat Islam hanya saja yang membedakan disini adalah

²²KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Op, Cit.*, hlm. 78.

garis keras memandang bahwa penerapan syari'ah harus dilakukan melalui otoritas pemerintahan (seperti perda) sementara mayoritas Islam di Indonesia yang tidak sesuai dengan garis keras memandang bahwa syari'at Islam wajib diamalkan tetapi tidak harus melalui otoritas pemerintahan, melainkan kesadaran setiap individual.²³

Representasi kalangan Islam yang menyuarakan atau mendukung isu syari'ah dan khilafah Islamiyah belum signifikan untuk menyukseskan perjuangannya tersebut, karena kalangan Islam yang tidak menghendaki pelegalformalan syari'at Islam dalam konstitusi negara jauh lebih dominan. Bahkan kalangan ini didukung oleh media massa dan kaum *Islamophobia*. Akibatnya, gagasan tentang syaria'at Islam apalagi Islam Khilafah Islamiyah masih sebatas wacana gerakan dan belum menjadi agenda politik bangsa yang penting, bahkan isu-isu tersebut tidak akan menjadi isu politik negara yang urgen dalam dekade politik mendatang.²⁴

Islam dan demokrasi adalah dua konsep dari entitas kultur yang berbeda. Maka ketika keduanya

bertemu, betapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara relatif bersesuaian, tak pelak menimbulkan gesekan-gesekan yang cukup tajam.²⁵ Dalam konteks sekarang ini, penolakan atas wacana syari'at Islam dan Khilafah Islamiyah yang diusung oleh beberapa gerakan Islam dapatlah dipahami karena wacana tidak relevan dengan kenyataan sosiologis masyarakat Indonesia yang heterogen. Tetapi penolakan itu sendiri dapat di netralisir dengan pendekatan politik demokratis, bahwa kalangan mayoritas dalam dalam sistem politik demokratik mestinya menjadi dominan utama dari kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan nilai-nilai yang eksis. Inipun harus segera dinetralisir, bahwa demokrasi yang digunakan tidak dimaknai pula dengan kelaim ideologis, tetapi hanya sebuah mekanisme politik guna merespons aspirasi ril masyarakat, dan aspirasi ini tidak dibedakan atas dasar mayoritas tetapi atas dasar argumen-argumen rasional dan pijakan empiriknya.

²³KH. Abdurrahman Wahid (ed), *Op, Cit.*, hlm. 146.

²⁴Syarifuddin Jurdi, *Op, Cit.*, hlm. 20.

²⁵Masyikuri Abdullah, *Demokrasi di persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. vii.

E. Kesimpulan

Bagi sebagian umat Islam, konsep negara Islam bukanlah suatu yang harus disingkirkan dari pertarungan ide-ide dan gagasan politik pada tingkat global, tetapi bagi sebagian yang lain negara Islam merupakan suatu yang menyatu dengan masyarakat. Kelompok yang mendukung gagasan ini menegaskan bahwa pemisahan antara wilayah-wilayah pribadi dan umum, negara dan masyarakat biasa terdapat pada kebudayaan Barat, sehingga tidak dikenal dalam Islam. Negara adalah suatu pernyataan

politik dari suatu masyarakat Islam. Bagi kaum muslimin Islam adalah lebih dari suatu keyakinan; itulah komunitasnya, bangsanya, ajang tempat mencapai keberibadiannya yang sejati (kedirian). Negara ataupun masyarakat Islam adalah suatu masyarakat yang berdasarkan kepada keyakinan bersama mengenai ke-Tuhanan. Indonesia adalah masyarakat yang sifatnya *plural societies* (masyarakat majemuk) sebagai *ideal type* masyarakat Indonesia yang berbeda dengan negara Islam yang ada berada dibelahan bumi yang lain.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Masyikuri, *Demokrasi di persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Abdullah, Masyikuri, *Demokrasi Dipersimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)
- Asrori, Yani, Ahmad, *Menuju Khilafah Islamiyyah; Perjuangan Ikhwanul Muslimin*, (Yogyakarta: Syasat Press, 2008)
- Bubalo, Antoni, dkk, *PKS dan Kembarannya; Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*, Terj, Syamsul Rizal, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012)
- Choueiri, M., *Youssef Islam Garis Keras; Melacak Akar Gerakan Fundamentalisme*, Terj, Humaidi Syuhud, (Yogyakarta: Qonun, 2003)
- Esposito, L., John, *Unholy War; Teror Atas Nama Islam*, (Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003)
- Jurdi, Syarifuddin, *Pemikiran Politik Islam Indonesia; Pertautan Negara, Khilafah, Masyarakat Madani dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik; Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syari'ah dan Ham, Fundamentalisme dan Anti Korupsi*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2013)
- Lapidus, M., Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)
- Piscatori, James, dan Dale F. Eickelman, *Politik Muslim; Wacana Kekuasaan dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998)
- Stoddard, L., *Arah Baru Islam di Indonesia*, (Djakarta, 1966)
- Wahid, Abdurrahman, (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: Gerakan Bhineka Tunggal Ika, The Wahid Institute, Maarif Institute, 2009)
- Zuhri, M., *Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad Rasulullah*, (Yogyakarta: LESFI, 2004)